



# RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH (RENJA-PD) TAHUN 2023



## DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

Jalan Danau Aji Nomor 99 Telp. (0541) 661281 Fax 664541 Kode Pos 75512

e-mail : [diskopukm@kutaikartanegarakab.go.id](mailto:diskopukm@kutaikartanegarakab.go.id)

TENGGARONG

## KATA PENGANTAR



**D**engan mengucapkan puji dan syukur kehadirat Allah SWT, Tuhan sekalian alam yang senantiasa melimpahkan rahmat dan karunia – Nya kepada kita sekalian, shalawat dan salam senantiasa tercurah untuk junjungan kita, Nabiullah Rosululloh Muhammad SAW, beserta kerabat, sahabat serta kita sekalian pengikut sampai akhir zaman. Ranwal Rencana Kerja (RENJA) Perangkat Daerah Dinas Koperasidan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2023 ini dapat diselesaikan.

Rencana Kerja Dinas Koperasidan Usaha Kecil Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2023 ini merupakan dokumen turunan dari Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah periode 2021-2026.

Dan pada Tahun 2023 menjadi tahun kedua dalam pelaksanaan Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah atau Rencana Jangka Menengah Kabupaten Kutai Kartanegara (RPJMD) Tahun 2021-2026

Selanjutnya pada kesempatan ini kami mengucapkan terima kasih kepada pihak yang membantu, baik secara langsung maupun tidak langsung dalam penyusunan Rancangan Akhir Rencana Kerja Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2023 ini.

Demikian dan dengan Izin dan KehendakNya semoga dokumen ini dapat memberikan arah yang sinergis, terkoordinasi dan saling melengkapi antara satu dengan yang lainnya, sehingga dapat mewujudkan tujuan organisasi sesuai dengan visi misi yang telah ditetapkan.

Tenggarong, April 2022  
Kepala Dinas  
Koperasidan Usaha Kecil dan Menengah  
Kabupaten Kutai Kartanegara

**Drs. H. TAJUDDIN**  
NIP. 196404051986031036

No	Nama	Jabatan	Paraf
1	Hj. Ismi Nurul Huda, S.P., M.M	Sekretaris	
2	Endri Rosandi, S.Sos	Kabid Pemberdayaan dan Pengembangan Koperasi	
3	Samijan, S.E., M.Si	Kabid Kelembagaan dan Pengawasan Koperasi	
4	Dianto Raharjo, S.P., M.P	Kabid Pemberdayaan Usaha Mikro	
5	Linda, SE	Kasubbag Penyusunan Program dan Keuangan	

## DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	
DAFTAR ISI	i
DAFTAR TABEL	ii
BAB I. PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Landasan Hukum	2
1.3 Maksud dan Tujuan	4
1.4 Sistematika Penulisan	4
BAB II. HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA-PD TAHUN LALU	
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja-PD Tahun Lalu dan Capaian Renstra-PD	6
2.2 Analisa Kinerja Pelayanan OPD	13
2.3 Isu – Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi OPD	17
2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD	17
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat	28
BAB III. TUJUAN DAN SASARAN DINAS KOPERASI DAN UKM	
3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi	32
3.2 Tujuan dan Sasaran Renja-PD	33
BAB IV. RENCANA KERJA PENDANAAN PERANGKAT DAERAH	35
BAB V. PENUTUP	47

## DAFTAR TABEL

Hal :

2.1	Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja-PD dan Pencapaian Renstra-PD s/d Tahun 2020 (T.C 29)	07
2.2	Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Koperasi dan UKM (T-C.30)	15
2.3	Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2021 (T.C 31)	18
2.4	Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2020 (TC 32)	28
3.1	Tujuan dan Sasaran Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Kutai Kartanegara 2016-2021	34
4.1	Rencana Program Dan Kegiatan Prioritas	36

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang

Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2023 Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Kutai Kartanegara merupakan Rencana Kerja Tahunan yang paralel dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Kutai Kartanegara berfungsi sebagai dokumen perencanaan tahunan yang penyusunannya memperhatikan seluruh aspirasi pemangku kepentingan pembangunan melalui penyelenggaraan kegiatan Musrenbang tahunan yang diselenggarakan secara berjenjang untuk mencapai keterpaduan Rancangan Renja Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Mengacu pada Undang - Undang Nomor. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), diamanatkan dalam Pasal 2 ayat (2) bahwa perencanaan pembangunan nasional disusun secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh, dan tanggap terhadap perubahan, dan Pasal 3 ayat (2) bahwa Perencanaan Pembangunan Nasional terdiri atas perencanaan pembangunan yang disusun secara terpadu oleh kementerian/lembaga dan perencanaan pembangunan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya. Disebutkan juga dalam Pasal 3 ayat (3) Perencanaan Pembangunan Nasional menghasilkan rencana pembangunan jangka panjang, perencanaan jangka menengah, maupun perencanaan tahunan. Untuk itu dalam mengimplementasikan pelaksanaan Perencanaan Pembangunan Nasional tersebut maka setiap tahun Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota harus menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Sementara itu paralel dengan pembuatan RKPD, sesuai dengan pasal 7 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 juga mewajibkan setiap SKPD atau sekarang dikenal dengan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) membuat dan memiliki Renja SKPD/OPD, yang berfungsi sebagai dokumen perencanaan tahunan, penyusunannya dengan memperhatikan seluruh aspirasi pemangku kepentingan pembangunan melalui penyelenggaraan Musrenbang tahunan yang diselenggarakan secara berjenjang untuk keterpaduan Rancangan Renja SKPD/OPD.

Renja OPD merupakan Dokumen rencana pembangunan OPD yang berjangka waktu 1 (satu) tahun guna mengopersionalkan RKPD yang disertai

dengan upaya mempertahankan dan meningkatkan capaian kinerja pelayanan masyarakat yang sudah dicapai oleh OPD, sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

## **1.2. Landasan Hukum**

Landasan hukum yang mewajibkan bagi setiap OPD untuk memiliki Rencana Kerja (Renja – OPD) adalah :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4700);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 260 ayat (1) bahwa Daerah sesuai dengan kewenangannya menyusun rencana pembangunan Daerah sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional. Dalam Pasal 263 bahwa Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah terdiri atas :
  - a. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJP Daerah);  
merupakan penjabaran dari visi, misi, arah kebijakan, dan sasaran pokok pembangunan Daerah jangka panjang untuk 20 (dua puluh) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RPJPN dan rencana tata ruang wilayah.
  - b. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJM Daerah);  
merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program kepala daerah yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, pembangunan Daerah dan keuangan Daerah, serta program Perangkat Daerah dan lintas Perangkat Daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RPJPD dan RPJMN.
  - c. Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).  
merupakan penjabaran dari RPJMD yang memuat rancangan kerangka ekonomi Daerah, prioritas pembangunan Daerah, serta rencana kerja dan pendanaan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang disusun dengan berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah dan program strategis nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.

4. Peraturan Pemerintah 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
5. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
6. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 136 Tahun 2017);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2017;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2020 Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2021;
11. Kemendagri nomor : 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur No. 15 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2005-2025;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 17 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten

- Kutai Kartanegara (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2010 Nomor 17);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 9 tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat daerah Kabupaten Kutai Kartanegara;
  15. Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor. 58 Tahun 2015 Tentang Pedoman Pemberian Izin Usaha Mikro Kecil;
  16. Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor. 3 Tahun 2016 Tentang Pemberdayaan Koperasi;
  17. Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor. 5 Tahun 2019 Tentang Kedudukan, Susunan, Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Pada Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Kutai Kartanegara.
  18. Surat Edaran Bupati Kutai Kartanegara Nomor : B-370/BAPP/V.1/065.II/02/2020, tanggal 16 Februari 2022, tentang Penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah (RENJA-PD) Tahun 2023;

### **1.3 Maksud dan Tujuan**

#### **1. Maksud**

Menetapkan dokumen perencanaan yang memuat program, dan kegiatan yang menjadi tolok ukur penilaian kinerja Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Kutai Kartanegara dalam melaksanakan tugas dan fungsinya tahun 2023, dalam rangka mencapai Visi dan Misi Bupati Kutai Kartanegara.

#### **2. Tujuan**

Untuk merumuskan program, dan kegiatan pembangunan yang sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Kutai Kartanegara selama tahun 2023.

### **1.4 Sistematika Penulisan**

Dokumen Renja-PD Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Kutai Kartanegara tahun 2023 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

#### **BAB I. PENDAHULUAN**

Bab ini memuat latar belakang perlunya Renja-PD, maksud dan tujuan, landasan hukum, hubungan Renja-PD Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Kutai Kartanegara dengan Dokumen Perencanaan Lainnya, dan uraian singkat tentang sistematika penyusunan Renja-PD.

**BAB II. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA-PD TAHUN LALU**

Dalam bab ini memuat struktur organisasi Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Kutai Kartanegara berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2016 Nomor 73)

**BAB III. TUJUAN DAN SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN**

Dalam Bab ini dipaparkan rumusan Tujuan dan Sasaran serta Program dan Kegiatan Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Kutai Kartanegara yang merupakan penjabaran dari visi dengan lebih spesifik dan terukur yang dilengkapi dengan rencana sasaran yang hendak dicapai dengan uraian program dan kegiatan yang merupakan penjabaran dari strategi dan kebijakan yang diambil dalam mewujudkan tujuan.

**BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH**

Dalam Bab ini dipaparkan / dikemukakan rencana kerja pendanaan program dan kegiatan, indikator kinerja Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Kutai Kartanegara;

**BAB V. PENUTUP**

Berisikan catatan penting yang perlu mendapat perhatian, kaidah-kaidah pelaksanaan, dan rencana tindak lanjut.

## BAB II

### HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA-PD TAHUN LALU

#### 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja-PD Tahun Lalu dan Capaian Renstra-PD

Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD) Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Kutai Kartanegara menyajikan pengukuran terhadap hasil kinerja kegiatan yang telah dilaksanakan selama kurun waktu 2021-2026;

Tercapai tidaknya pelaksanaan kegiatan-kegiatan atau program yang telah disusun dapat dilihat berdasarkan Laporan Kinerja dan Laporan Keuangan. Laporan Kinerja adalah Iktisar yang menjelaskan secara ringkas dan lengkap tentang capaian kinerja yang disusun berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan dalam rangka pelaksanaan APBD. Kinerja sendiri dapat dijelaskan sebagai keluaran/hasil dari kegiatan/program yang hendak atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas terukur. Untuk mengukur kinerja itu sendiri diperlukan indikator kinerja yang merupakan alat ukur untuk pencapaian suatu kebijakan / program / kegiatan. Maka dalam penyusunan Renja Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2023 diperlukan hasil evaluasi kinerja pelaksanaan Program dan Kegiatan tahun sebelumnya dapat dilihat pada Tabel 2.1 sebagai berikut :

**Tabel 2.1 (T.C 29)**  
**Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja-PD dan Pencapaian Renstra-PD s/d Tahun 2023**

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2021			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah) Tahun 2023	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan 2022					
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)				
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)				
2		URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR												
2.17		KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH												
2.17	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN / KOTA	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	80	80	80	80	100%	80	80	100%			
	01	2	01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Rencana, Anggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	20	6	4	0	0%	0	6	30%	
	01	2	01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan	5	1	1	0	0%	1	2	40%
	01	2	01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Capaian Kinerja	15	5	3	0	0%	3	8	53%
	01	2	02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Keuangan yang Akuntabel	10	2	2	2	100%	2	6	60%
	01	2	02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya Pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN	60	12	12	0	0%	12	24	40%
	01	2	02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan bulanan/Triwulanan/ Semesteran	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan	5	1	1	0	0%	1	2	40%



01	2	07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah	100%	0	0	0	100%	0	0	0%	
01	2	07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	159	23	25	0	0%	32	55	35%	
01	2	08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Pemerintahan Daerah	100%	0	0	0	100%	0	0	0%	
01	2	08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Materai	981	109	109	0	0%	218	327	33%	
01	2	08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Jasa Pembayaran rekening	60	12	12	0	0%	12	24	40%	
01	2	08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	60	12	12	0	0%	12	24	40%	
01	2	09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	0	0	0	100%	0	0	0%	
01	2	09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan yang dipelihara	125	34	25	0	0%	25	59	47%	
01	2	09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	140	20	20	0	0%	30	50	36%	
01	2	09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	5512	1112	1124	0	0%	1112	2224	40%	
2.17	02			<b>PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM</b>	<b>Persentase Koperasi yang memiliki Ijin usaha simpan pinjam</b>	75,6%	0	0	0	75,6%	0	0	0%	
2.17	02	2	01	Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan Penerbitan Izin Usaha Simpan Koperasi	100%	0	0	0	100%	0	0	0%	
2.17	02	2	01	01	Fasilitasi Pemenuhan Izin Usaha Simpan Pinjam dan Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Koperasi yang di Fasilitasi	50	10	10	0	0%	10	20	40%

2.17	03				<b>PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI</b>	Persentase Kepatuhan Koperasi Melaksanakan RAT	27,24%	0	0	0	#DIV/0!	0	0	0%
2.17	03	2	01		<b>Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota</b>	<b>Persentase pemeriksaan dan pengawasan koperasi</b>	<b>83,87%</b>	0	0	0	<b>83,87%</b>	0	0	0%
2.17	03	2	01	01	Pengawasan Kekuatan, Kesehatan, Kemandirian, Ketangguhan, serta Akuntabilitas Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Pengawasan Koperasi	200	0	34	13	38%	125	138	69%
						Jumlah Koperasi yang didampingi RAT	30	0	24	10	42%	10	20	67%
2.17	03	2	01	02	Pemeriksaan Kepatuhan Koperasi terhadap Peraturan Perundang-Undangan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Pemeriksaan Koperasi	325	0	150	150	100%	150	300	92%
						Jumlah Fasilitasi Pembubaran Koperasi	25	0	5	5	100%	5	10	40%
2.17	04				<b>PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI</b>	<b>Persentase Koperasi KSP/USP berkategori Sehat dan Cukup Sehat</b>	<b>18,52%</b>	0	0	0	17,86%	0	0	0%
2.17	04	2	01		Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Penilaian dan Penghargaan Kesehatan KSP/USP	180	11	53	0	0%	0	11	6%
2.17	04	2	01	01	Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan kabupaten/Kota	Jumlah koperasi yang diberikan sertifikat penilaian	90	11	53	0	0%	75	86	96%
2.17	04	2	01	02	Penghargaan Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah penghargaan koperasi	90	0	0	0	#DIV/0!	65	65	72%
2.17	05				<b>PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN</b>	Persentase Pengurus dan Pengawas yang memiliki sertifikat pelatihan Perkoperasian	100,00%	0	0	0	#DIV/0!	0	0	0%
2.17	05	2	01		Pendidikan dan Latihan Perkoperasian bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah koperasi yang diberikan Pendidikan dan Pelatihan Perkoperasian	405	0	0	0	#DIV/0!	0	0	0%

2.17	05	2	01	01	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	Jumlah Peserta yang dilatih	810	60	252	0	0%	180	240	30%
2.17	06				<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI</b>	Persentase meningkatnya Aset Koperasi	4,86%	0	0	0	#DIV/0!	0	0	0%
						Persentase meningkatnya Volume Usaha (Omset) Koperasi	4,86%	0	0	0	#DIV/0!	0	0	0%
2.17	06	2	01		Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi	60	0	25	0	0%	0	0	0%
2.17	06	2	01	01	Pemberdayaan Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Koperasi yang di Fasilitasi	60	0	25	0	0%	60	60	100%
2.17	07				<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)</b>	Persentase UMKM yang telah difasilitasi	9,77%	0	0	0	#DIV/0!	0	0	0%
2.17	07	2	01		Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	Jumlah UMKM yang di berdayakan	5504	406	0	0	#DIV/0!	0	406	7%
2.17	07	2	01	01	Pendataan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Jumlah Data Potensi Usaha Mikro	3	1	0	0	#DIV/0!	1	2	67%
2.17	07	2	01	02	Pemberdayaan melalui Kemitraan Usaha Mikro	Jumlah Pendampingan Pelaku Usaha	80	0	0	0	#DIV/0!	20	20	25%
2.17	07	2	01	03	Fasilitasi Kemudahan Perizinan Usaha Mikro	Jumlah umkm yang difasilitasi kemudahan perizinan usaha	700	75	140	0	0%	106	181	26%
2.17	07	2	01	04	Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Jumlah Peserta Pelatihan	2400	290	480	0	0%	0	290	12%
						Pelatihan Wirausaha baru	1200	40	240	0	0%	480	520	43%
						Penguatan Kapasitas kelembagaan Usaha Mikro	15	0	3	0	0%	3	3	20%
2.17	07	2	01	05	Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam	Jumlah Pelaku Usaha Yang Mengakses Permodalan	640	0	160	0	0%	120	120	19%

				Pemberdayaan Usaha Mikro	Pendampingan Pembentukan dan Fasilitas Sarana Prasarana Klinik Klinik K-UMKM	13	0	1	0	0%	2	2	15%	
					Jumlah Rapat-rapat Koordinasi K-UMKM	5	0	1	0	0%	1	1	20%	
2.17	08			<b>PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM</b>	<b>Pertumbuhan Omset UMKM</b>	<b>1,4%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>#DIV/0!</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>	
2.17	08	2	01	<b>Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha menjadi Usaha Kecil</b>	<b>Jumlah Pengembangan Usaha Mikro</b>	<b>1700</b>	<b>0</b>	<b>420</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>	
2.17	08	2	01	01	Fasilitasi Usaha Mikro Menjadi Usaha Kecil dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi	Jumlah Pelaku Usaha Yang difasilitasi akases Pemasaran	600	0	120	0	0%	120	120	20%
					Jumlah Pelaku Usaha yang dilatih Kemasan, dan bantuan sarana prasarana	1100	0	300	0	0%	200	200	18%	
					Jumlah Event yang diikuti	17	2	1	0	0%	4	6	35%	

## 2.2 Analisa Kinerja Pelayanan OPD

Sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Kutai Kartanegara sebagaimana dengan Dokumen Rencana Strategis Tahun 2021-2026 sasaran Strategis Dinas Koperasi dan UKM sebagai berikut :

1. Meningkatnya Transparansi dan Akuntabilitas Kinerja Koperasi dan UKM;
2. Meningkatnya UMKM Wirausaha Baru;
3. Meningkatnya Kualitas Kelembagaan Koperasi;
4. Meningkatnya Produktifitas dan Kualitas Usaha Mikro

Pada tahun 2021 Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah telah melaksanakan 8 Program dengan capaian kinerja Organisasi yang dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dengan 8 Kegiatan 21 Sub Kegiatan yang berisikan kegiatan rutin Perkantoran pada setia Perangkat Daerah, dengan rata-rata capaiannya Nilai SAKIP Perangkat Daerah sebesar **82,92 %**

2. Program Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam

Program Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam ada 1 Kegiatan, 1 Sub Kegiatan yang berisikan kegiatan fasilitasi pemenuhan izin usaha simpan pinjam dan pembukaan kantor cabang, cabang pembantu dan kantor kas koperasi simpan pinjam untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota, capaiannya rata-rata **97,4%**

3. Program Pengawasan Dan Pemeriksaan Koperasi

Program Pengawasan Dan Pemeriksaan Koperasi ada 1 Kegiatan, 2 sub kegiatan, yang berisikan kegiatan pengawasan kekuatan, kesehatan, kemandirian, ketangguhan serta akuntabilitas koperasi kewenangan kabupaten/kota dan pemeriksaan kepatuhan koperasi terhadap peraturan perundang-undangan kewenangan kabupaten / kota dengan capainnya **100%**

4. Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi;

Program Peneilaian Kesehatan Ksp/Usp Koperasi ada 1 Kegiatan, 2 sub kegiatan yang berisikan pelaksanaan penilaian kesehatan KSP/USP koperasi kewenangan kabupaten/kota dan penghargaan kesehatan KSP/USP koperasi kewenangan kabupaten/kota dengan rata-rata capaiannya **100%**

5. Program Pendidikan Dan Pelatihan Perkoperasian

Program Pendidikan Dan Pelatihan Perkoperasian ada 1 Kegiatan, 1 sub kegiatan yang berisikan kegiatan pendidikan dan latihan perkoperasian bagi koperasi yang wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota untuk peningkatan

pemahaman dan pengetahuan perkoperasian serta kapasitas dan kompetensi SDM Koperasi dengan rata-rata pencapaiannya Program **98%**

**6. Program Pemberdayaan Dan Perlindungan Koperasi**

Program Pemberdayaan Dan Perlindungan Koperasi ada 1 Kegiatan, 1 sub kegiatan dengan kegiatan yang dilaksanakan pemberdayaan peningkatan produktivitas, nilai tambah, akses pasar, akses pembiayaan, penguatan kelembagaan, penataan manajemen, sandarisasi, dan restrukturisasi usaha koperasi kewenangan Kabupaten/kota, dengan rata-rata pencapaiannya **85%**

**7. Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil Dan Usaha Mikro (Umkm)**

Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil Dan Usaha Mikro (Umkm) ada 1 Kegiatan dan 5 sub Kegiatan, Adapun Kegiatannya pemberdayaan usaha mikro yang dilakukan melalui pendataan, kemitraan, kemudahan perizinan, penguatan kelembagaan dan koordinasi dengan para pemangku kepentingan dalam pemberdayaan usaha mikro, dengan rata-rata pencapaiannya **100%**

**8. Program Pengembangan UMKM**

Program Pengembangan Pengembangan UMKM dengan 1 kegiatan, 1 sub kegiatan yang kegiatannya fasilitasi usaha mikro menjadi usaha kecil dalam pengembangan produksi dan pengolahan, pemasaran, SDM serta Design dan Teknologi, dengan tingkat capaiannya **96,67 %**

Capaian kinerja pelayanan OPD Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Kutai Kartanegara berdasarkan indikator kinerja, untuk uraian terhadap pencapaian kinerja pelayanan OPD Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Kutai Kartanegara detailnya dapat dilihat pada Tabel 2.2 berikut :

**Tabel 2.2 (T-C.30)**  
**Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Koperasi dan UKM**

No.	Indikator	SPM/Standar Nasional	IKK	Target Renstra - PD				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1	Persentase Koperasi yang berkualitas	-	-	4,00%	7,00%	10,00%	13,00%	4,40%		10,00%	13,00%	
2	Persentase Usaha Mikro yang menjadi Wirausaha	-	-	11,54%	11,89%	12,24%	12,59%	37,56%		12,24%	12,59%	
3	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	-	-	67,76%	68,00%	70,00%	77,00%	71,40%		70,00%	77,00%	
4	Persentase Koperasi Aktif	-	-	81,53%	82,00%	82,00%	82,00%	82,50%		82,00%	82,00%	
5	Persentase Kepatuhan Koperasi Melaksanakan RAT	-	-	14,98%	15,56%	19,46%	21,40%	16,00%		19,46%	21,40%	
6	Persentase Koperasi KSP/USP berkategori Sehat dan Cukup Sehat	-	-	0,00%	3,70%	7,41%	11,11%	-		7,41%	11,11%	
7	Persentase Pengurus dan Pengawas yang memiliki sertifikat pelatihan Perkoperasian	-	-	31,50%	100,00%	100,00%	100,00%	-		100,00%	100,00%	
8	Persentase Koperasi yang memiliki ijin usaha simpan pinjam	-	-	38,93%	45,93%	53,33%	60,74%	55,70%		53,33%	60,74%	

9	Persentase meningkatnya Aset dan Omset Koperasi	-	-	n/a	0,97%	1,95%	2,92%			1,95%	2,92%	
10	Persentase Pertumbuhan Wirausaha baru	-	-	0,23	0,35%	0,44%	0,94%	17,14%		0,44%	0,94%	
11	Persentase UMKM yang telah difasilitasi	-	-	n/a	1,81%	1,99%	1,99%			1,99%	1,99%	
12	Persentase UMKM Naik Kelas	-	-	3,60%				3,48%				
13	Pertumbuhan Omset UMKM	-	-	n.a	0,28%	0,57%	0,85%			0,57%	0,85%	

### **2.3 Isu – Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi OPD**

Dengan melihat kondisi dari tingkat capaian pelayanan sebagaimana di atas, terdapat beberapa isu penting terkait penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah yaitu :

- a. Masih rendahnya likuiditas KSP/USP.
- b. Masih rendahnya pemahaman pengelola KSP/USP – Koperasi dalam mengelola kegiatan koperasi.
- c. Masih rendahnya manajemen dan daya saing produk UMKM.
- d. Kurangnya pertumbuhan dan wirausaha baru terutama UMKM.
- e. Masih adanya koperasi yang tidak aktif (beku).
- f. Rendahnya ketrampilan manajemen pengurus koperasi.
- g. Rendahnya ketrampilan pengawas dalam bidang pengawasan.
- h. Rendahnya manajemen usaha, seringkali ada yang belum melakukan pemisahan antara bisnis/usaha dan rumah tangga.
- i. Belum memiliki legitimasi tempat usaha, belum memiliki legitimasi hukum atas asset, sehingga terjadi kesulitan dalam mengakses kredit perbankan.
- j. Rendahnya kualitas SDM, sehingga pola kemitraan sulit diterapkan baik di bidang produksi, pemasaran maupun teknologi.
- k. Rendahnya ketersediaan skim permodalan secara khusus bagi KUMKM.
- l. Rendahnya pemahaman kelompok masyarakat dalam membentuk lembaga Keuangan Mikro (LKM).
- m. Kurang berfungsinya Dewan Koperasi Indonesia Daerah Kukar.

### **2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD**

Paparan dalam membandingkan antara rancangan awal RKPD dengan hasil analisa kebutuhan dituangkan dalam bentuk tabel sebagai berikut :

Tabel 2.3 (T.C 31)

**Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2023  
Kabupaten Kutai Kartanegara**

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Diskop-UKM	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		11.761.092.392	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Diskop-UKM	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		12.037.161.437	
1.1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Diskop-UKM	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Pelaporan		290.000.000	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Diskop-UKM	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Pelaporan		290.000.000	
1.1.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Diskop-UKM	Jumlah Dokumen Perencanaan	1 Dokumen	100.000.000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Diskop-UKM	Jumlah Dokumen Perencanaan	1 Dokumen	100.000.000	
1.1.2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Diskop-UKM	Jumlah Dokumen Laporan Capaian Kinerja	3 Dokumen	190.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Diskop-UKM	Jumlah Dokumen Laporan Capaian Kinerja	3 Dokumen	190.000.000	
1.2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Diskop-UKM	Jumlah Laporan Administrasi Keuangan yang Akuntabel		9.087.184.077	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Diskop-UKM	Jumlah Laporan Administrasi Keuangan yang Akuntabel		9.363.253.122	
1.2.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Diskop-UKM	Jumlah Pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN	12 bulan	8.982.743.077	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Diskop-UKM	Jumlah Pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN	12 bulan	9.258.812.122	

1.2.2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Diskop-UKM	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan	1 Dokumen	104.441.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Diskop-UKM	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan	1 Dokumen	104.441.000
1.3	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Diskop-UKM	Jumlah Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD yang direkonsiliasi	1 Dokumen	93.926.000	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Diskop-UKM	Jumlah Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD yang direkonsiliasi	1 Dokumen	93.926.000
1.3.1	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Diskop-UKM	Jumlah Dokumen Laporan BMD	1 Dokumen	93.926.000	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Diskop-UKM	Jumlah Dokumen Laporan BMD	1 Dokumen	93.926.000
1.4	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Diskop-UKM			160.000.000	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Diskop-UKM			160.000.000
1.4.1	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Diskop-UKM	Jumlah Pakaian Dinas Berserta Atribut Kelengkapannya bagi Pegawai	106 Stel	110.000.000	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Diskop-UKM	Jumlah Pakaian Dinas Berserta Atribut Kelengkapannya bagi Pegawai	106 Stel	110.000.000
1.4.2	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Diskop-UKM	Jumlah pegawai yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	30 Orang	50.000.000	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Diskop-UKM	Jumlah pegawai yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	30 Orang	50.000.000
1.4.3	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Diskop-UKM	Jumlah Peserta yang mengikuti Sosialisasi	30 ASN	-	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Diskop-UKM	Jumlah Peserta yang mengikuti Sosialisasi	30 ASN	-
1.5	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Diskop-UKM	Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah		535.121.335	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Diskop-UKM	Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah		535.121.335
1.5.1	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Diskop-UKM	Jumlah ATK	45 jenis	70.000.000	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Diskop-UKM	Jumlah ATK	45 jenis	70.000.000

1.5.2	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Diskop-UKM	Jumlah Penyediaan Bahan Logistik Kantor	19 jenis	50.000.000	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Diskop-UKM	Jumlah Penyediaan Bahan Logistik Kantor	19 jenis	50.000.000	
			Jumlah Porsi Makan dan Minum	800 porsi				Jumlah Porsi Makan dan Minum	800 porsi		
1.5.3	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Diskop-UKM	Jumlah Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	7 Jenis	49.999.800	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Diskop-UKM	Jumlah Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	7 Jenis	49.999.800	
1.5.4	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Diskop-UKM	Jumlah Bahan Bacaan, Peraturan Perundang-undangan dan Advetorial yang disediakan	2 Jenis	25.000.000	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Diskop-UKM	Jumlah Bahan Bacaan, Peraturan Perundang-undangan dan Advetorial yang disediakan	2 jenis	25.000.000	
1.5.5	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Diskop-UKM	Jumlah Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	205 OH	230.071.535	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Diskop-UKM	Jumlah Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	205 OH	230.071.535	
1.5.6	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Diskop-UKM	Jumlah Sarana dan prasarana Arsip pada SKPD	7 Unit	85.050.000	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Diskop-UKM	Jumlah Sarana dan prasarana Arsip pada SKPD	7 Unit	85.050.000	
1.5	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Diskop-UKM	Jumlah Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1 Web	25.000.000	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Diskop-UKM	Jumlah Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1 Web	25.000.000	
1.6	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Diskop-UKM	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah	2 Paket/Jenis	184.292.528	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Diskop-UKM	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah	2 Paket/Jenis	184.292.528	

1.6.1	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Diskop-UKM	Jumlah Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	32 unit	184.292.528	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Diskop-UKM	Jumlah Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	32 unit	184.292.528
1.7	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Diskop-UKM	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Pemerintahan Daerah		914.696.592	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Diskop-UKM	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Pemerintahan Daerah		914.696.592
1.7.1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Diskop-UKM	Jumlah Materai	218 Lembar	2.398.000	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Diskop-UKM	Jumlah Materai	218 Lembar	2.398.000
1.7.2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Diskop-UKM	Jumlah Jasa Pembayaran rekening	12 bulan	152.859.432	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Diskop-UKM	Jumlah Jasa Pembayaran rekening	12 bulan	152.859.432
1.7.3	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Diskop-UKM	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	12 bulan	759.439.160	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Diskop-UKM	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	12 bulan	759.439.160
1.8	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Diskop-UKM	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		495.871.860	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Diskop-UKM	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		495.871.860
1.8.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Diskop-UKM	Jumlah Kendaraan yang dipelihara	25 unit	180.700.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Diskop-UKM	Jumlah Kendaraan yang dipelihara	25 unit	180.700.000
1.8.2	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Diskop-UKM	Jumlah Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	30 unit	30.000.000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Diskop-UKM	Jumlah Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	30 unit	30.000.000

1.8.3	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Diskop-UKM	Jumlah Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	1.112 M2	285.171.860	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Diskop-UKM	Jumlah Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	1.112 M2	285.171.860
2	PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI		Persentase pemeriksaan dan pengawasan	67%	450.000.000	PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI		Persentase pemeriksaan dan pengawasan	67%	450.000.000
2.1	Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Tersebar	Jumlah Koperasi yang diperiksa dan diawasi	425 Koperasi	450.000.000	Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Tersebar	Jumlah Koperasi yang diperiksa dan diawasi	425 Koperasi	450.000.000
2.1.1	Pengawasan Kekuatan, Kesehatan, Kemandirian, Ketangguhan, serta Akuntabilitas Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Tersebar	Jumlah Pengawasan	150 koperasi	175.000.000	Pengawasan Kekuatan, Kesehatan, Kemandirian, Ketangguhan, serta Akuntabilitas Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Tersebar	Jumlah Pengawasan	150 koperasi	175.000.000
2.1.2	Pemeriksaan Kepatuhan Koperasi terhadap Peraturan Perundang-Undangan Kewenangan Kabupaten/Kota	Tersebar	Jumlah Pemeriksaan	275 koperasi	275.000.000	Pemeriksaan Kepatuhan Koperasi terhadap Peraturan Perundang-Undangan Kewenangan Kabupaten/Kota	Tersebar	Jumlah Pemeriksaan	275 koperasi	275.000.000
3	PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI		Persentase usaha simpan pinjam koperasi yang dinilai kesehatannya	15%	210.000.000	PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI		Persentase usaha simpan pinjam koperasi yang dinilai kesehatannya	15%	210.000.000

3.1	Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Tersebar	Jumlah Penilaian dan Penghargaan Kesehatan KSP/USP	180 Koperasi	210.000.000	Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Tersebar	Jumlah Penilaian dan Penghargaan Kesehatan KSP/USP	180 Koperasi	210.000.000
3.1.1	Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan kabupaten/Kota	Tersebar	Jumlah koperasi yang diberikan sertifikat penilaian	75 koperasi	120.000.000	Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan kabupaten/Kota	Tersebar	Jumlah koperasi yang diberikan sertifikat penilaian	75 koperasi	120.000.000
3.1.2	Penghargaan Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Tersebar	Jumlah penghargaan koperasi	65 koperasi	90.000.000	Penghargaan Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Tersebar	Jumlah penghargaan koperasi	65 koperasi	90.000.000
4	PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	Tersebar	Persentase koperasi yang mengikuti Pendidikan dan pelatihan Koperasi	19,17% 60 koperasi	300.000.000	PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	Tersebar	Persentase koperasi yang mengikuti Pendidikan dan pelatihan Koperasi	19,17% 60 koperasi	200.000.000
4.1	Pendidikan dan Latihan Perkoperasian bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	3 wilayah (hulu, tengah, pesisir)	Jumlah koperasi yang diberikan Pendidikan dan Pelatihan Perkoperasian	60 koperasi	300.000.000	Pendidikan dan Latihan Perkoperasian bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	3 wilayah (hulu, tengah, pesisir)	Jumlah koperasi yang diberikan Pendidikan dan Pelatihan Perkoperasian	60 koperasi	200.000.000
4.1.1	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	3 wilayah (hulu, tengah, pesisir)	Jumlah Peserta yang dilatih Perkoperasian	180 orang	300.000.000	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	3 wilayah (hulu, tengah, pesisir)	Jumlah Peserta yang dilatih Perkoperasian	120 orang	200.000.000
5	PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM	18 Kecamatan	Persentase fasilitasi penerbitan ijin usaha simpan	70%	100.000.000	PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM	18 Kecamatan	Persentase fasilitasi penerbitan ijin usaha simpan	70%	100.000.000

			pinjam koperasi					pinjam koperasi			
			Persentase fasilitasi penerbitan izin pembukaan kantor cabang, cabang pembantu dan kantor kasusaha simpan pinjam untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota					Persentase fasilitasi penerbitan izin pembukaan kantor cabang, cabang pembantu dan kantor kasusaha simpan pinjam untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota			
5.1	Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Tersebar	Cakupan Penerbitan Izin Usaha Simpan Koperasi	100%	100.000.000	Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Tersebar	Cakupan Penerbitan Izin Usaha Simpan Koperasi	100%	100.000.000	
5.1.1	Fasilitasi Pemenuhan Izin Usaha Simpan Pinjam dan Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Tersebar	Jumlah Koperasi yang di Fasilitasi	10 Koperasi	100.000.000	Fasilitasi Pemenuhan Izin Usaha Simpan Pinjam dan Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Tersebar	Jumlah Koperasi yang di Fasilitasi	10 Koperasi	100.000.000	
5	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI		Persentase meningkatnya Omzet dan Aset Koperasi	10%	560.000.000	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI		Persentase meningkatnya Omzet dan Aset Koperasi	10%	560.000.000	

5.1.	Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Tersebar	Jumlah Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi	66 koperasi	560.000.000	Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Tersebar	Jumlah Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi	66 koperasi	560.000.000
5.1.1	Pemberdayaan Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Tersebar	Fasilitasi pendampingan kelembagaan dan manajemen koperasi	60 koperasi	560.000.000	Pemberdayaan Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Tersebar	Fasilitasi pendampingan kelembagaan dan manajemen koperasi	60 koperasi	560.000.000
6	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)		Persentase Pemberdayaan UMKM	0,85%	2.330.000.000	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)		Persentase Pemberdayaan UMKM	0,85%	2.330.000.000
6.1	Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan		Jumlah Pemberdayaan UMKM	80%	2.330.000.000	Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan		Jumlah Pemberdayaan UMKM	80%	2.330.000.000
6.1.1	Pendataan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro		Jumlah data potensi usaha mikro	1 Dokumen	200.000.000	Pendataan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro		Jumlah data potensi usaha mikro	1 Dokumen	200.000.000
6.1.2	Pemberdayaan melalui Kemitraan Usaha Mikro		Jumlah Pendampingan	20	50.000.000	Pemberdayaan melalui Kemitraan Usaha Mikro		Jumlah Pendampingan	20	50.000.000
6.1.3	Fasilitasi Kemudahan Perizinan Usaha Mikro	4 Kecamatan	1. Jumlah Sertifikasi Halal	3 sertifikat	125.000.000	Fasilitasi Kemudahan Perizinan Usaha Mikro	4 Kecamatan	1. Jumlah Sertifikasi Halal	3 sertifikat	125.000.000
			2. Jumlah Ijin PIRT	3 ijin PIRT	125.000.000			2. Jumlah Ijin PIRT	3 ijin PIRT	125.000.000
			3. Jumlah IUMK Yang Diterbitkan	100 IUMK	250.000.000			3. Jumlah IUMK Yang Diterbitkan	100 IUMK	250.000.000

6.1.4	Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	4 Kecamatan, 16 Desa (sanga-Sanga, Muara Jawa, Loa Janan, Tenggara Seberang)	Jumlah Peserta Pelatihan	480 Orang	510.000.000	Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	4 Kecamatan, 16 Desa (sanga-Sanga, Muara Jawa, Loa Janan, Tenggara Seberang)	Jumlah Peserta Pelatihan	480 Orang	510.000.000	
		4 Kecamatan (Samboja, Muara Wis, Sebulu dan Marang Kayu)	Pelatihan Wirausaha baru	240 Orang	310.000.000			4 Kecamatan (Samboja, Muara Wis, Sebulu dan Marang Kayu)	Pelatihan Wirausaha baru	240 Orang	310.000.000
		3 Kecamatan (Kota Bangun, Sanga-sanga, Muara kaman)	Penguatan Kapasitas kelembagaan Usaha Mikro	3 Unit	285.000.000			3 Kecamatan (Kota Bangun, Sanga-sanga, Muara kaman)	Penguatan Kapasitas kelembagaan Usaha Mikro	3 Unit	285.000.000
6.1.5	Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Pelaku Usaha Yang Mengakses Permodalan	120 umkm	200.000.000	Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Pelaku Usaha Yang Mengakses Permodalan	120 umkm	200.000.000	
		Loa Kulu	Pendampingan Pembentukan dan Fasilitas Sarana Prasarana Klinik Klinik K-UMKM	2 Klinik	200.000.000			Loa Kulu	Pendampingan Pembentukan dan Fasilitas Sarana Prasarana Klinik Klinik K-UMKM	2 Klinik	200.000.000
		Tenggarong	Jumlah Rakor K-UMKM	1 Rakor	75.000.000			Tenggarong	Jumlah Rakor K-UMKM	1 Rakor	75.000.000
7	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM		Persentase Pengembangan UMKM	0,01%	2.190.000.000	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM		Persentase Pengembangan UMKM	0,01%	2.040.000.000	
			Persentase usaha mikro yang diberikan pendampingan melalui lembaga pendampingan	3,29%					Persentase usaha mikro yang diberikan pendampingan melalui lembaga pendampingan	3,29%	

7.1	Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha menjadi Usaha Kecil		Jumlah Usaha Mikro yang Naik Kelas	1 Pelaku	2.190.000.000	Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha menjadi Usaha Kecil		Jumlah Usaha Mikro yang Naik Kelas	1 Pelaku	2.040.000.000	
7.1.1	Fasilitasi Usaha Mikro Menjadi Usaha Kecil dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi	Tenggarong, Tenggarong Seberang	Jumlah Pelaku Usaha Yang difasilitasi	120 umkm	350.000.000	Fasilitasi Usaha Mikro Menjadi Usaha Kecil dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi	Tenggarong, Tenggarong Seberang	Jumlah Pelaku Usaha Yang difasilitasi	120 umkm	350.000.000	
		UMKM	Jumlah Kemasan	200 UMKM	1.240.000.000		UMKM	Jumlah Kemasan	176 UMKM	1.090.000.000	
		Penas, Erau, Merah Putih	Jumlah Event yang diikuti	4 Event	600.000.000		Penas, Erau, Merah Putih	Jumlah Event yang diikuti	4 Event	600.000.000	
JUMLAH					17.901.092.392	JUMLAH					17.927.161.437

Hasil analisa kebutuhan merupakan usulan Program/kegiatan berdasarkan pagu yang diberikan pada saat Forum Perangkat Daerah, sehingga terdapat perbedaan rincian dengan Rancangan Awal Renja Perangkat Daerah, perbedaan tersebut pada besaran anggaran tiap kegiatan, juga terdapat perbedaan pada rincian Output serta jumlah target kegiatan;

## 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Pada tahun ini Pembahasan dilakukan terlebih dahulu pengentrian usulan pada Sistem Perencanaan (SIMRAL) sebagai bahan Pembahasan yang kemudian Rancangan Rencana Kerja Dinas Koperasi dan UKM didiskusikan dalam pembahasan Forum OPD Kabupaten Kutai Kartanegara dan pembahasan dilakukan untuk menyelaraskan rumusan rancangan Renja dengan Kesepakatan hasil Musrenbang.

Pada Pembahasan di Forum OPD ada beberapa Program/Kegiatan yang ditujukan kepada Dinas Koperasi dan UKM diantaranya :

Penelaahan usulan program dan kegiatan dari pemangku kepentingan tersaji dalam Tabe berikut ini.

Tabel 2.4 (TC 32)

Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2023

Kabupaten Kutai Kartanegara

NO	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran / Volume	Catatan
1	2	3	4	5	6
1	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)</b>				
	Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	Kepala Desa Bunga Jadi	Jumlah IUMK Yang Diterbitkan	1 Kecamatan	Rekomendasi : Setuju sesuai dengan hasil kesepakatan Musreimbang Kecamatan Koefisien
	Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	Kepala Desa Kota Bangun III	Jumlah IUMK Yang Diterbitkan	1 Kecamatan	Rekomendasi : Prioritas
	Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	Kepala Desa Kota Bangun III	Jumlah IUMK Yang Diterbitkan	1 Kecamatan	Rekomendasi : Prioritas

	Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	Kepala Desa Buana Jaya	Jumlah IUMK Yang Diterbitkan	1 Kecamatan	Rekomendasi : Diteruskan ke OPD pengempu untuk mengikuti anggaran Koefisien
	Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	Lurah Sanga-Sanga Muara	Jumlah IUMK Yang Diterbitkan	1 Kecamatan	Rekomendasi : Proposal serta Lokasi/Kelompok Disiapkan Koefisien
	Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	Kepala Desa Bangun Rejo	Jumlah IUMK Yang Diterbitkan	1 Kecamatan	Rekomendasi : Diteruskan ke OPD pengempuan penilaian untuk Koefisien
	Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	Lurah Sanga-Sanga Dalam	Jumlah IUMK Yang Diterbitkan	1 Kecamatan	Rekomendasi : masuk daftar renja dan dipenuhi dokumen pendukung Koefisien
	Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	Kepala Desa Loa Kulu Kota	Jumlah IUMK Yang Diterbitkan	1 Kecamatan	Rekomendasi : Lengkapi persyaratan dan kelengkapan lainnya utk disperindakop Koefisien
	Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	Lurah Bukit Merdeka	Jumlah IUMK Yang Diterbitkan	1 Kecamatan	Rekomendasi : Lengkap dengan dukungan data dan dukungan kegiatan yang menjadi skala prioritas
	Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	Lurah Dondang	Jumlah IUMK Yang Diterbitkan	1 Kecamatan	Rekomendasi : Hasil musrenbang dan merupakan prioritas kecamatan mengutamakan instansi yang menanganinya
2	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM				
	Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha menjadi Usaha Kecil	Kepala Desa Tanjung Harapan	Jumlah Peserta Pelatihan	1 Kecamatan	Rekomendasi : Kegiatan sesuai kamus proposal untuk Pelatihan bagi usaha kecil menengah yang merupakan kewenangan Dinas Koperasi dan UKM.

Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha menjadi Usaha Kecil	Kepala Desa Loa Pari	Jumlah Peserta Pelatihan	1 Kecamatan	Rekomendasi : Hasil proposal musrenbangcam diteruskan ke opd pelaksana untuk dilakukan verifikasi dan ditindaklanjuti Koefisien
Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha menjadi Usaha Kecil	Kepala Desa Separi	Jumlah Peserta Pelatihan	1 Kecamatan	Rekomendasi : Hasil proposal musrenbangcam dan kegiatan prioritas kecamatan mengutamakan OPD Pelaksana Anggaran untuk ditindak lanjuti Koefisien
Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha menjadi Usaha Kecil	Kepala Desa Separi	Jumlah Peserta Pelatihan	1 Kecamatan	Rekomendasi : Hasil proposal musrenbangcam dan prioritas kecamatan menjelaskan ke OPD pelaksana untuk ditindaklanjuti Koefisien
Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha menjadi Usaha Kecil	Kepala Desa Kayu Batu	Jumlah Peserta Pelatihan	1 Kecamatan	Rekomendasi : UNTUK DI PRIORITYASKAN USULAN TERSEBUT SESUAI DENGAN KEBUTUHAN Koefisien
Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha menjadi Usaha Kecil	Kepala Desa Buana Jaya	Jumlah Peserta Pelatihan	1 Kecamatan	Rekomendasi : Diteruskan ke OPD Dinas Perikanan untuk penilaian Koefisien
Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha menjadi Usaha Kecil	Lurah Sanga-Sanga Muara	Jumlah Peserta Pelatihan	1 Kecamatan	Rekomendasi : Proposal Disiapkan dan Lokasi/Kelompok Siap
Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha menjadi Usaha Kecil	Lurah Samboja Kuala	Jumlah Peserta Pelatihan	1 Kecamatan	Rekomendasi : Lengkap dengan data Pendukung dan kegiatan yang menjadi skala prioritas
Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha menjadi Usaha Kecil	Lurah Sanga-Sanga Dalam	Jumlah Peserta Pelatihan	1 Kecamatan	Rekomendasi : masuk daftar renja dan dipenuhi dokumen pendukung Koefisien
Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha menjadi Usaha Kecil	Lurah Sanga-Sanga Dalam	Jumlah Peserta Pelatihan	1 Kecamatan	Rekomendasi : masuk daftar renja
Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha menjadi Usaha Kecil	Lurah Sanga-Sanga Dalam	Jumlah Peserta Pelatihan	1 Kecamatan	Rekomendasi : Masuk daftar renja
Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha menjadi Usaha Kecil	Lurah Dondang	Jumlah Peserta Pelatihan	1 Kecamatan	Rekomendasi : Usulan masuk Renja 2023 Dinas Koperasi

					dan UMKM
	Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha menjadi Usaha Kecil	Lurah Tama Tiang	Jumlah Peserta Pelatihan	1 Kecamatan	Rekomendasi : Usulan masuk Renja 2023 Dinas Koperasi dan UMKM
	Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha menjadi Usaha Kecil	Lurah Muara Kembang	Jumlah Peserta Pelatihan	1 Kecamatan	Rekomendasi : Usulan masuk Renja 2023 Dinas Koperasi dan UMKM
	Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha menjadi Usaha Kecil	Lurah Muara Kembang	Jumlah Peserta Pelatihan	1 Kecamatan	Rekomendasi : Usulan masuk Renja 2023 Dinas Koperasi dan UMKM
<b>3</b>	<b>PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN</b>				
	Pendidikan dan Latihan Perkoperasian bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Desa Liang Buaya	Jumlah Peserta yang dilatih Perkoperasian	1 Kecamatan	Rekomendasi : Setuju sesuai dengan hasil kesepakatan Musrembang Kecamatan Koefisien
	Pendidikan dan Latihan Perkoperasian bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Desa Buana Jaya	Jumlah Peserta yang dilatih Perkoperasian	1 Kecamatan	Rekomendasi : Diteruskan ke OPD pengempu untuk dilakukan pengungkit Koefisien
	Pendidikan dan Latihan Perkoperasian bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Kelurahan Dondang	Jumlah Peserta yang dilatih Perkoperasian	1 Kecamatan	Rekomendasi : Usulan masuk Renja 2023 Dinas Koperasi dan UMKM
	Pendidikan dan Latihan Perkoperasian bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Desa Menamang Kanan	Jumlah Peserta yang dilatih Perkoperasian	1 Kecamatan	Rekomendasi : Setuju sesuai dengan hasil kesepakatan Musrembang Kecamatan Koefisien

**BAB III**  
**TUJUAN DAN SASARAN**  
**DINAS KOPERASI DAN UKM**

**3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi**

Ditetapkannya Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah yang ditindak lanjuti dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota telah membawa perubahan sistem Pemerintahan Indonesia yang sentralistis ke arah desentralistik.

Dan bila dikaitkan dengan Urusan di Bidang Koperasi dan UKM maka Pemberdayaan Koperasi dan UKM, berkaitan langsung dengan kehidupan dan peningkatan kesejahteraan bagi sebagian besar rakyat Indonesia (pro poor). Selain itu, potensi dan peran strategisnya telah terbukti menjadi penopang kekuatan dan pertumbuhan ekonomi nasional (pro growth). Keberadaan Koperasi dan UKM yang dominan sebagai pelaku ekonomi nasional juga merupakan subyek vital dalam pembangunan, khususnya dalam rangka pertuasan kesempatan berusaha bagi wirausaha baru dan penyerapan tenaga kerja serta menekan angka pengangguran

Dengan memperhatikan peran dan potensinya dalam perekonomian nasional, keberadaan Koperasi dan UKM terbukti merupakan pelaku usaha yang mandiri, kukuh dan fleksibel, dalam kondisi normal maupun krisis sekatipun. Bahkan tidak dapat disangkal oleh siapapun bahwa Koperasi dan UKM merupakan leader perekonomian Indonesia. Ia menjadi jantung ekonomi rakyat, dan pelopor tumbuhnya ekonomi kerakyatan

Beberapa kebijakan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat maupun Propinsi berkaitan dengan pengembangan Koperasi dan UKM :

Kebijakan Nasional Urusan Koperasi dan UKM yang utama sebagai berikut :

1. Mewujudkan Koperasi Modern yang berdaulat, mandiri, dan maju dengan Fokus Kontribusi PDB sector Koperasi, Mewujudkan Koperasi Model Baru dan Modern, Pertumbuhan Stat-Up berbasis Koperasi;
2. Mewujudkan UMKM Naik Kelas yang berdaulat mampu bersaing di Pasar Domestik dan Global dengan Focus, Kontribusi PDB di sector UMKM, Nilai Ekspor UMKM, Nilai Investrasi UMKM, UKM Naik Kelas, Pertumbuhan Tenaga Kerja UMKM, Rasio Kewirausahaan;

Kebijakan Propinsi Urusan Koperasi dan UKM yang utama sebagai berikut :

Meningkatkan Usaha Ekonomi Koperasi dan UKM, melalui Sumbangan Kontribusi Koperasi dan UKM terhadap PDRB dengan focus menciptakan Koperasi Unggulan, dan UKM Unggulan

## **3.2 Tujuan dan Sasaran Renja-PD**

### **3.2.1 Tujuan**

Berdasarkan visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Kutai Kartanegara terpilih dengan Fokus Pembangunan Tahun 2022 dan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Kutai Kartanegara, maka dapat diuraikan Tujuan dan sasarannya sebagai berikut :

1. Tujuan Pertama, Meningkatkan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan.
2. Tujuan Kedua, Meningkatnya Produktifitas melalui Pemberdayaan dan Penguatan Kualitas Koperasi dan UMKM dengan Fokus Memberdayakan dan menguatkan usaha mikro dan koperasi terutama dari akses permodalan, manajemen usaha, teknologi Produksi, Informasi, dan pemasaran;

Tujuan merupakan penjabaran dari misi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu yang ditetapkan yaitu 5 (lima) tahun.

Pencapaian tujuan dan sasaran merupakan sebuah rencana menyeluruh dan terpadu mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakn secara operasional dengan memperhatikan, ketersediaan sumber daya organisasi.

### **3.2.2 Sasaran**

Berdasarkan tujuan tersebut maka sasaran yang akan dicapai sebagai berikut

1. Sasaran Pertama, *Meningkatkan Transparansi dan Akuntabilitas Kinerja Diskop UKM;*
2. Sasaran Kedua, *Mempertahankan Jumlah Koperasi Aktif, dengan indicator Persentase Koperasi Aktif;*
3. Sasaran Ketiga, *Meningkatnya Pertumbuhan Wirausaha, dengan Indikator Meningkatnya Pertumbuhan Wirausaha;*
4. Sasaran Keempat, *Pengembangan Usaha bagi masyarakat miskin berdasarkan Basis Data Terpadu Kemiskinan dan berbasis teknologi informasi, Indikatornya Jumlah Fasilitasi Pengembangan Usaha bagi masyarakat miskin berdasarkan Basis Data Terpadu Kemiskinan dan berbasis teknologi informasi*

Tabel 3. 1

## Tujuan dan Sasaran Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Kutai Kartanegara 2022

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN / SASARAN	Satuan	Kondisi Awal	INDIKATOR				
						2022	2023	2024	2025	2026
1	Meningkatnya kinerja penyelenggaraan urusan Koperasi dan UMKM	Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Diskop UKM	Predikat Akuntabilitas Kinerja	Persentase	67.76	70%	75%	80%	85%	90%
2	Meningkatnya Produktifitas melalui Pemberdayaan dan Penguatan Kualitas Koperasi dan UMKM	Meningkatnya Kualitas Koperasi dan UMKM	Persentase Koperasi yang meningkat Kualitasnya	Persentase	4%	7%	10%	13%	16%	19%
			Persentase Koperasi yang Aktif	Persentase	82%	82%	82%	82%	82%	82%
			Persentase usaha mikro yang menjadi wirausaha	Persentase	12%	12,57%	12,75%	12,93%	13,11%	13,28%

**BAB IV**  
**RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PD**

Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Rencana Kerja Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Kutai Kartanegara disusun berdasarkan pertimbangan sebagai berikut :

1. Mendukung pencapaian sasaran dan Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2023 dengan Fokus / Tema Pembangunan Kutai Kartanegara “Memperkuat Landasan Bagi Percepatan (Akselerasi) dan Pembaharuan (Transformasi) Pembangunan Berbasis Potensi Kewilayahan dan Komoditi Unggulan Daerah;
2. Mendukung Visi dan Misi Kepala Daerah terpilih dalam Visi Mewujudkan Masyarakat Kutai Kartanegara yang sejahtera dan berbahagia, dengan Misi Kepala Daerah terpilih :



Dalam Rencana Kerja Tahun 2023 ini Dinas Koperasi memperhatikan berbagai Regulasi dan memastikan Sinkronisasi Substansi dan Proses dalam Penyusunan Renja Perangkat Daerah dimama Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan sebagaimana amanat dari Permendagri Nomor 90 tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 050/3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

**Tabel 4.1**  
**RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS**  
**DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH TAHUN 2023**

KODE	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
2.17.01	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH</b>	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Diskop-UKM	100%	12.037.161.437			100%	11.761.092.392
2.17.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Pelaporan	Diskop-UKM	4 Dokumen	290.000.000	Apbd		4 Dokumen	290.000.000
2.17.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Diskop-UKM	1 Dokumen	100.000.000	Apbd	Indikator Sub Kegiatan Kepmen 050-5889	1 Dokumen	100.000.000
2.17.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Diskop-UKM	3 Dokumen	190.000.000	Apbd	Indikator Sub Kegiatan Kepmen 050-5889	3 Dokumen	190.000.000
2.17.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Keuangan yang Akuntabel	Diskop-UKM		9.363.253.122	Apbd			9.087.184.077

2.17.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Diskop-UKM	76/12 Orang/bulan	9.258.812.122	Apbd	Indikator Sub Kegiatan Kepmen 050-5889	76/12 Orang/bulan	8.982.743.077
2.17.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Diskop-UKM	1 Laporan	104.441.000	Apbd	Indikator Sub Kegiatan Kepmen 050-5889	1 Laporan	104.441.000
2.17.01.2.03	<b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>	<b>Jumlah Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD yang direkonsiliasi</b>	<b>Diskop-UKM</b>	<b>1 Laporan</b>	<b>93.926.000</b>	<b>Apbd</b>		<b>1 Laporan</b>	<b>93.926.000</b>
2.17.01.2.03.05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Diskop-UKM	1 Laporan	93.926.000	Apbd	Indikator Sub Kegiatan Kepmen 050-5889	1 Laporan	93.926.000
2.17.01.2.05	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>		<b>Diskop-UKM</b>		<b>160.000.000</b>	<b>Apbd</b>			<b>160.000.000</b>
2.17.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Diskop-UKM	106 Paket	110.000.000	Apbd	Indikator Sub Kegiatan Kepmen 050-5889	106 Paket	110.000.000
2.17.01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Diskop-UKM	30 Orang	50.000.000	Apbd	Indikator Sub Kegiatan Kepmen 050-5889	30 Orang	50.000.000
2.17.01.2.06	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah	<b>Diskop-UKM</b>		<b>535.121.335</b>	<b>Apbd</b>			<b>555.114.000</b>

2.17.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Diskop-UKM	1 Paket	10.000.000	Apbd	Indikator Sub Kegiatan Kepmen 050-5889	1 Paket	10.000.000
2.17.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Diskop-UKM	1 Paket	70.000.000	Apbd	Indikator Sub Kegiatan Kepmen 050-5889	1 Paket	70.000.000
2.17.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Diskop-UKM	2 Paket	50.000.000	Apbd	Indikator Sub Kegiatan Kepmen 050-5889	2 Paket	50.000.000
2.17.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Diskop-UKM	1 Paket	49.999.800	Apbd	Indikator Sub Kegiatan Kepmen 050-5889	1 Paket	50.000.000
2.17.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	Diskop-UKM	2 Dokumen	25.000.000	Apbd	Indikator Sub Kegiatan Kepmen 050-5890	2 Dokumen	25.000.000
2.17.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Diskop-UKM	1 Laporan	230.071.535	Apbd	Indikator Sub Kegiatan Kepmen 050-5889	1 Laporan	250.064.000
2.17.01.2.06.10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Diskop-UKM	1 Dokumen	75.050.000	Apbd	Indikator Sub Kegiatan Kepmen 050-5889	5 Dokumen	75.050.000
2.17.01.2.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Diskop-UKM	1 Dokumen	25.000.000	Apbd	Indikator Sub Kegiatan Kepmen 050-5889	1 Dokumen	25.000.000

2.17.01.2.07	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah</b>	<b>Diskop-UKM</b>	<b>100%</b>	<b>184.292.528</b>	Apbd		<b>100%</b>	<b>164.299.863</b>
2.17.01.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Diskop-UKM	32 unit	184.292.528	Apbd	Indikator Sub Kegiatan Kepmen 050-5889	30 unit	164.299.863
2.17.01.2.08	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Pemerintahan Daerah</b>	<b>Diskop-UKM</b>	<b>100%</b>	<b>914.696.592</b>	Apbd		<b>100%</b>	<b>914.696.592</b>
2.17.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Diskop-UKM	1 Laporan	2.398.000	Apbd	Indikator Sub Kegiatan Kepmen 050-5889	1 Laporan	2.398.000
2.17.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Diskop-UKM	1 Laporan	152.859.432	Apbd	Indikator Sub Kegiatan Kepmen 050-5889	1 Laporan	152.859.432
2.17.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Diskop-UKM	1 Laporan	759.439.160	Apbd	Indikator Sub Kegiatan Kepmen 050-5889	1 Laporan	759.439.160
2.17.01.2.09	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Diskop-UKM</b>	<b>100%</b>	<b>495.871.860</b>	Apbd		<b>100%</b>	<b>495.871.860</b>
2.17.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Diskop-UKM	25 unit	180.700.000	Apbd	Indikator Sub Kegiatan Kepmen 050-5889	25 unit	180.700.000

2.17.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Diskop-UKM	30 unit	30.000.000	Apbd	Indikator Sub Kegiatan Kepmen 050-5889	20 unit	30.000.000
2.17.01.2.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Diskop-UKM	3 Unit	285.171.860	Apbd	Indikator Sub Kegiatan Kepmen 050-5889	3 Unit	285.171.860
2.17.03	<b>PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI</b>	<b>Persentase Kepatuhan Koperasi yang melaksanakan RAT</b>	<b>Kab. Kutai Kartanegara</b>	<b>19,46%</b>	<b>450.000.000</b>	<b>Apbd</b>	<b>Kab. Kutai Kartanegara</b>	<b>21,40%</b>	<b>450.000.000</b>
2.17.03.02.01	<b>Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota</b>	<b>Pesentase Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi</b>	<b>Kab. Kutai Kartanegara</b>	<b>67,89%</b>	<b>450.000.000</b>	<b>Apbd</b>	<b>Kab. Kutai Kartanegara</b>	<b>75,88%</b>	<b>450.000.000</b>
2.17.03.02.01.01	Pengawasan Kekuatan, Kesehatan, Kemandirian, Ketangguhan, serta Akuntabilitas Koperasi Kabupaten/Kota	Jumlah Koperasi yang Telah Dilakukan Pengawasan Kekuatan, Kesehatan, Kemandirian, Ketangguhan, serta Akuntabilitas Koperasi Kabupaten/Kota	Muara Muntai, Tenggarong, Tenggarong Seberang, Muara Badak, Muara Jawa, Samboja, Anggana, Sanga-Sanga, Muara Wis, Muara Kaman, Kota Bangun, Kenohan, Kembang Janggut, Tabang, Sebulu, Loa Kulu, Marangkayu, Loa Janan.	165 Unit Usaha	175.000.000	Apbd	Indikator Sub Kegiatan Kepmen 050-5889	175 Unit Usaha	175.000.000

2.17.03.02.01.02	Pemeriksaan Kepatuhan Koperasi terhadap Peraturan Perundang-Undangan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Koperasi yang Memenuhi Peraturan Perundang-Undangan Kewenangan Kabupaten/Kota Kinerja	Muara Muntai, Tenggarong, Tenggarong Seberang, Muara Badak, Muara Jawa, Samboja, Anggana, Sanga-Sanga, Muara Wis, Muara Kaman, Kota Bangun, Kenohan, Kembang Janggut, Tabang, Sebulu, Loa Kulu, Marangkayu, Loa Janan.	280 Unit Usaha	275.000.000	Apbd	Indikator Sub Kegiatan Kepmen 050-5889	275 Unit Usaha	275.000.000
2.17.04	<b>PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI</b>	<b>Persentase Koperasi KSP/USP Berkatagori Sehat dan Cukup Sehat</b>	<b>Kab. Kutai Kartanegara</b>	<b>7,41%</b>	<b>210.000.000</b>	<b>Apbd</b>		<b>11,11%</b>	<b>210.000.000</b>
2.17.04.2.01	Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Penilaian dan Penghargaan Kesehatan KSP/USP	Kab. Kutai Kartanegara	150 Unit Usaha	210.000.000	Apbd		160 Unit Usaha	210.000.000

2.17.04.2.01.01	Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan kabupaten/Kota	Jumlah Unit Usaha Koperasi yang Telah Dilakukan Penilaian Kesehatan	Muara Muntai, Tenggarong, Tenggarong Seberang, Muara Badak, Muara Jawa, Samboja, Anggana, Sanga-Sanga, Muara Wis, Muara Kaman, Kota Bangun, Kenohan, Kembang Janggut, Tabang, Sebulu, Loa Kulu, Marangkayu, Loa Janan.	75 Unit Usaha	120.000.000	Apbd	Indikator Sub Kegiatan Kepmen 050-5889	80 Unit Usaha	120.000.000
2.17.04.2.01.02	Penghargaan Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Koperasi yang Mendapatkan Penghargaan Kesehatan	Muara Muntai, Tenggarong, Tenggarong Seberang, Muara Badak, Muara Jawa, Samboja, Anggana, Sanga-Sanga, Muara Wis, Muara Kaman, Kota Bangun, Kenohan, Kembang Janggut, Tabang, Sebulu, Loa Kulu, Marangkayu, Loa Janan.	75 Unit Usaha	90.000.000	Apbd	Indikator Sub Kegiatan Kepmen 050-5889	80 Unit Usaha	90.000.000
2.17.05	<b>PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN</b>	Persentase Pengrus dan Pengawas yang memiliki sertifikat petihan perkoperasian	1. Kec. Muara Muntai 2. Kec. Teggaron 3. Kec. Muara Badak 4. Kec. Muara Jawa	100,00%	200.000.000			100,00%	300.000.000

2.17.05.2.01	<b>Pendidikan dan Latihan Perkoperasian bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Jumlah koperasi yang diberikan Pendidikan dan Pelatihan Perkoperasian</b>	1. Kec. Muara Muntai 2. Kec. Teggarong 3. Kec. Muara Badak 4. Kec. Muara Jawa	<b>90 Koperasi</b>	<b>200.000.000</b>	<b>Apbd</b>		<b>90 Koperasi</b>	<b>300.000.000</b>
2.17.05.2.01.01	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Perkoperasian	1. Kec. Muara Muntai 2. Kec. Teggarong 3. Kec. Muara Badak 4. Kec. Muara Jawa	180 orang	200.000.000	Apbd	Indikator Sub Kegiatan Kepmen 050-5889	180 orang	300.000.000
2.17.02	<b>PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM</b>	<b>Persentase Koperasi yang memiliki ijin usaha simpan pinjam</b>	<b>Loa Janan , Anggana , Tenggarong , Sebulu , Kota Bangun , Samboja , Muara Jawa</b>	<b>53,3%</b>	<b>100.000.000</b>	<b>Apbd</b>		<b>60,7%</b>	<b>100.000.000</b>
2.17.02.2.01	Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan Penerbitan Izin Usaha Simpan Koperasi	<b>Loa Janan , Anggana , Tenggarong , Sebulu , Kota Bangun , Samboja , Muara Jawa</b>	<b>100%</b>	<b>100.000.000</b>	<b>Apbd</b>		<b>100%</b>	<b>100.000.000</b>
2.17.02.2.01.01	Fasilitasi Pemenuhan Izin Usaha Simpan Pinjam dan Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Usaha Simpan Pinjam dan Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Loa Janan , Anggana , Tenggarong , Sebulu , Kota Bangun , Samboja , Muara Jawa, Sangasanga, Muara Muntai	10 Unit Usaha	100.000.000	Apbd	Indikator Sub Kegiatan Kepmen 050-5889	10 Unit Usaha	100.000.000

2.17.06	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI</b>	Persentase meningkatnya Omzet dan Aset Koperasi	Loa Kulu , Tenggarong , Sebulu , Kota Bangun , Muara Kaman , Tenggarong Seberang , Marang Kayu, Anggana, Muara Jawa	1,95%	560.000.000			2,29%	585.000.000
2.17.06.2.01	<b>Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Jumlah Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi</b>	Loa Kulu , Tenggarong , Sebulu , Kota Bangun , Muara Kaman , Tenggarong Seberang , Marang Kayu, Anggana, Muara Jawa	40 Orang	560.000.000			50 Orang	585.000.000
2.17.06.2.01.01	Pemberdayaan Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan UKM dan Kewirausahaan	Loa Kulu , Tenggarong , Sebulu , Kota Bangun , Muara Kaman , Tenggarong Seberang , Marang Kayu, Anggana, Muara Jawa	40 Orang	560.000.000	Apbd	Indikator Sub Kegiatan Kepmen 050-5889	50 Orang	585.000.000
2.17.07	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)</b>	Persentase UMKM yang telah difasilitasi	Kab. Kutai Kartanegara	1,99%	2.330.000.000			1,99%	2.330.000.000

2.17.07.2.01	<b>Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan</b>	<b>Jumlah UMKM yang di Berdayakan</b>	<b>Kab. Kutai Kartanegara</b>	<b>1.121 UMKM</b>	<b>2.330.000.000</b>	<b>Apbd</b>		<b>1.121 UMKM</b>	<b>2.330.000.000</b>
2.17.07.2.01.01	Pendataan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Jumlah Unit Usaha yang Produktif, Bernilai Tambah, Memiliki Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Kutai Kartanegara	121 Unit Usaha	200.000.000	Apbd	Indikator Sub Kegiatan Kepmen 050-5889	1 Unit Usaha	200.000.000
2.17.07.2.01.02	Pemberdayaan melalui Kemitraan Usaha Mikro	Jumlah Unit Usaha yang Telah Melaksanakan Kemitraan Usaha Mikro	Kab. Kutai Kartanegara	20 Unit Usaha	50.000.000	Apbd	Indikator Sub Kegiatan Kepmen 050-5889	20 Unit Usaha	50.000.000
2.17.07.2.01.03	Fasilitasi Kemudahan Perizinan Usaha Mikro	Jumlah Usaha Mikro yang Telah Mendapatkan Perizinan	Kec. Loa Kulu Kec. Sanga-Sanga Kec. Anggana Kec. Marang Kayu Kec. Samboja Kec. Tgr Seberang	140 Unit Usaha	500.000.000	Apbd	Indikator Sub Kegiatan Kepmen 050-5889	140 Unit Usaha	500.000.000
2.17.07.2.01.04	Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Jumlah Unit Usaha yang Telah Menerima Pembinaan dan Pendampingan Terhadap Usaha Mikro	Kec. Muara Wis Kec. Muara Kaman Kec. Kota Bangun Kec. Muara Jawa Kec. Sanga-sanga Kec. Marang kayu Kec. Tgr Seberang	720 Unit Usaha	1.105.000.000	Apbd	Indikator Sub Kegiatan Kepmen 050-5890	720 Unit Usaha	1.105.000.000

2.17.07.2.01.05	Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro	Jumlah SDM yang Telah Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro	Tenggarong, Anggana, Muara Badak, Muara Jawa	120 Orang	475.000.000	Apbd	Indikator Sub Kegiatan Kepmen 050-5889	120 Orang	475.000.000
2.17.08	<b>PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM</b>	<b>Pertumbuhan Omzet UMKM</b>	<b>Kab. Kutai Kartanegara</b>	<b>0,60%</b>	<b>2.040.000.000</b>			<b>0,90%</b>	<b>2.190.000.000</b>
2.17.08.2.01	<b>Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha menjadi Usaha Kecil</b>	<b>Jumlah Pengembangan Usaha Mikro</b>	<b>Kab. Kutai Kartanegara</b>	<b>320 Unit Usaha</b>	<b>2.040.000.000</b>			<b>320 Unit Usaha</b>	<b>2.190.000.000</b>
2.17.08.2.01.01	Fasilitasi Usaha Mikro Menjadi Usaha Kecil dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi	Jumlah Unit Usaha Mikro yang Terfasilitasi dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi	Loa Kulu , Tenggarong , Sebulu , Kota Bangun , Muara Kaman , Tenggarong Seberang , Marang Kayu	320 Unit Usaha	2.040.000.000	Apbd	Indikator Sub Kegiatan Kepmen 050-5889	320 Unit Usaha	2.190.000.000
<b>JUMLAH</b>					<b>17.927.161.437</b>				<b>17.926.092.392</b>

## BAB V

### PENUTUP

Demikian Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2023 Dinas Koperasi dan UKM dibuat yang berdasarkan dengan Surat Edaran Bupati Kutai Kartanegara Nomo B-370/BAPP/ V.1/065.II/02/2022 tanggal 16 Februari 2022 tentang Penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah (RENJA-PD) Tahun 2023;

Rencana Kerja Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2023 ini merupakan penjabaran dari sasaran dan Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2023 dengan Fokus / Tema Pembangunan Kutai Kartanegara "penyediaan infrastruktur dasar dan konektifitas wilayah yang berkualitas; peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan yang baik dan SDM yang berdaya saing; serta peningkatan nilai tambah potensi Ekonomi terbarukan dan kualitas lingkungan hidup. dan Visi dan Misi Kepala Daerah terpilih dalam Visi Mewujudkan Masyarakat Kutai Kartanegara yang sejahtera dan berbahagia,

Perangkat Daerah dalam mewujudkan Visi Misi Bupati Kutai Kartanegara terpilih tersebut telah tergambar kedalam program kegiatan dan Sub Kegiatan tahun 2023 dengan melihat hasil evaluasi pelaksanaan Program dan Kegiatan di Perangkat Daerah;

Akhir kata apabila terdapat kekeliruan dalam penyusunan ini akan kami lakukan perbaikan sebagaimana ketentuan yang berlaku, kritik dan saran sangat kami harapkan, terimakasih atas bantuan dari berbagai pihak;

Tenggarong, April 2022  
Kepala Dinas,  
Koperasi Dan Usaha Kecil Menengah  
Kabupaten Kutai Kartanegara

**Drs. TAJUDDIN**  
NIP. 196404051986031036